

PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENETAPAN USUL PRAKARSA DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG PERLINDUNGN NELAYAN DAN PERLINDUNGAN DISABILITAS SELASA, TANGGAL 4 AGUSTUS 2020

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, PIMPINAN OPD YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI MAUPUN YANG MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA INI SECARA VIRTUAL

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penetapan 2 (dua) Ranperda Usul Prakarsa DPRD, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD, Saudara Gubernur beserja jajarannya, yang telah berkenan hadir maupun yang mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini secara virtual.

Dengan mengucapkan "Bismillahhirahmanirahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Selasa Tanggal 4 Agustus 2020, dengan acara Penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, secara resmi kami bukan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

	Ketukan palu 3 x
Pimpinan Membacakan Dafta	ar Hadir

Berhubung jumlah Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna ini, jumlahnya telah lebih dari separoh dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum sudah terpenuhi dan Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Pada tanggal 31 Agustus 2020 kemaren, kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 Hijriah. Untuk itu, pada kesempatan pertama kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Adha Tahun 1441 Hijirah, Mohon Maaf Lahir dan Bathin ". Sesuai dengan makna Hari Raya Idul Adha tersebut, marilah kita kuatkan semangat dan pengorbanan dalam pengabdian kepada daerah dan masyarakat Sumatera Barat, untuk menjadikan Sumatera Barat yang lebih baik dan lebih maju... Amin YRA.

Sebelum ita masuk pada agenda utama Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan dibukanya kembali semua unit layanan publik pada semua instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD serta meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan banyaknya perantau yang mudik lebaran Idul Adha Tahun 1441, telah berimplikasi meningkatkan kasus penularan covid-19 di

Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita perlu cermati dan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus penyebaran Covid-19, padahal sudah ada protocol kesehatan yang diwajibkan kepada setiap masyarakat yang melakukan aktrivitas di luar rumah.

 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebarannya dan mengantisipasi munculnya klaster-klaster penyebaran baru covid-19 di Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, salah satu hak setiap Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, adalah mengajukan usul Rancangan Perda.

Melalui hak tersebut, setiap Anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan konstituennya dalam produk hukum daerah yang akan djadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hak yang di milikinya tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung di Komisi II Bidang Perekonomian, menggagas usul prakarsa terhadap Ranperda, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung di Komisi V, mengagas usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pembentukan Kedua Ranperda Usul Prakarsa tersebut telah masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Ide pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, muncul setelah Komisi II melihat kondisi nelayan kita yang pada umumnya masih hidup pada garis kemiskinan dan belum tergarapnya potensi sumber daya kelautan yang kita miliki secara optimal.

Hampir 32 % dari jumlah masyarakat miskin di Sumatera Barat, adalah masyarakat pesisir yang aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dari semua kepentingan di daerah.

Sedangkan pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adalah merupakan tindak lanjut di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabiltas dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yang belum diakomodir dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelum ke 2 (dua) Ranperda Usul Prakarsa tersebut ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, kita perlu memahami latarbelakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup yang akan diaturnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada Komisi II dan Komisi V sebagai pengusul untuk menjelaskan secara menyeluruh latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta cakupan muatan Ranperda dimaksud.

Untuk itu, kepada juru bicara pengusul dari Komisi II dan Komisi V, kami persilahkan secara bergantian menyampaikan penjelasannya.

•••••••••••••••••••••••••••••

- 1. Penyampaian Penjelasan Oleh Pengusul dari Komisi II.
- 2. Penyampaian Penjelasan Oleh Pengusul dari Komisi V.

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Pengusul dari Komisi II dan Komisi V yang telah menyampaikan penjelasannya terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang telah kita dengar dan simak bersama, pengusul dari Komisi II dan Komisi V, telah menyampaikan latarbelakang, maksud dan tujuan serta cakupan materi dari Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pengusul tersebut, kita dapat memahami, bahwa ke 2 (dua) Ranperda tersebut, sangat dibutuhkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memberikan jaminan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari masyarakat seutuhnya.

Sesuai dengan mekanisme penetapan Ranperda Usul Prakarsa sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib, usul yang yang disampaikan oleh Anggota DPRD, selanjutnya diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda, untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, baik terhadap aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis, serta kajian cakupan muatannya, untuk menentukan apakah proses pembentuknnya layak untuk di lanjutkan dan ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan DPRD telah menugaskan Bapemperda untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang menyeluruh.

Agar kita dapat mengetahui dan memahami hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Bapemperda, pada kesempatan ini kita minta kepada Bapemperda menyampaikan lapora hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukannya.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda, kami persilahkan untuk menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukannya.

Penyampaian Hasil Harmonisasi Bapemperda

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda, yang telah menyampaikan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan

> Pemberdaayan Nelayan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dari hasil kajian, harmonisasi dan pembulatan konsepsi yang telah dilakukan oleh Bapemperda, secara prinsip ke 2 (dua) Ranperda usul prakarsa tersebut, telah memenuhi syarat dan layak untuk diteruskan sebagai Prakarsa DPRD dengan beberapa catatan perbaikan yang harus dilakukan pengusul sebelum masuk pada tahap pembahasan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sebelum ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (6) Tata Tertib, terhadap penjelasan yang disampaikan oleh pengusul, Fraksi-Fraksi atau Anggota memberikan tanggapan, pertanyaan atau pandangannya dan pengusul memberikan pula jawaban atau tanggapannya terhadap semua masukan yang disampaikan oleh Fraksi dan Anggota DPRD tersebut.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami menanyakan kepada masing-masing Fraksi atau Anggota DPRD, apakah

ada masukan, tanggapan, pertanyaan terhadap digagasnya Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, atau setuju usul prakarsa terhadap Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat?

...... (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Frasi dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan persetujuannya terhadap usul prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk ditetapkan menjadi Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Tata Tertib DPRD, penetapan usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Penetapan Ranperda

dapat membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.	Prakarsa
	DPRD.
	Untuk
	itu,
	kepada
	Sdr.
	Prakarsa DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD
	DPRC

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami menanyakan kepada Fraksi-Fraksi dan Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah setuju konsep Keputusan DPRD tersebut, ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?

...... Ketokan palu 1 x

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi dan Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui konsep Keputusan DPRD dimaksud untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan Keputusan DPRD tersebut di beri Nomor :

- 1. Nomor: 8/SB/Tahun 2020 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- 2. Nomor: 9/SB/tahun 2020 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujui dan dtetapkan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai Prakarsa DPRD, maka Ranperda tersebut, telah dapat dilanjutkan pada proses pembahasan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Untuk itu, kepada Komisi II dan Komisi V sebagai pengusul, kami minta untuk dapat menyiapkan Nota Penjelasan, Ranperda dan Kajian Naskah Akademisnya, untuk dapat disampaikan kepada Pemerinah Daerah dan dan diagendakan jadwal pembahasannya dalam Rapat Badan Musyawarah yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Prakarsa terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sert Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulilah hirabbilalami, Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi ditutup.

...... (ketokan palu 3 x).

Terima Kasih Billahi taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

103-20